

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.  
Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

### **Buku :**

- Asshiddique, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Hakim, A. (2018). *Laporan Tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.  
Hidayat, S. d. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.  
Mokhsen. (2019). *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.  
Negara, P. T. (2001). *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
Nurtjahjo, H. (2005). *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Sejahtera.  
Rudito, B. (2016). *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kencana.  
Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.  
Wicaksono, K. W. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Karya Ilmiah :**

- Basarah, A. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 1 2014, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.  
Harahap, N. A. "Penguatan Kedudukan dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 2. 28 November 2016, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang  
Noore, A. I. "Analisis Pelaksanaan Seleksi Terbuka bagi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia". *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 3 No. 1 2019, Bandung : STIA LAN Bandung  
Polidu, R. M. "Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1 April 2018, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas G

Wishesa, D. I. “Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit”. *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 5 2020. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

**Sumber Lainnya :**

Tim Detik Com, “Jejak Romahurmuziy di Kasus Suap Kemenag hingga Divonis 2 Tahun”. <https://news.detik.com/berita/d-4866950/jejak-romahurmuziy-di-kasus-suap-kemenag-hingga-divonis-2-tahun/3> diakses pada tanggal 09 November 2020

Tim Detik Com “Drama Sekda Kota Bandung.” <https://regional.kompas.com/read/2018/11/22/07113621/drama-sekda-kota-bandung> diakses pada tanggal 09 November 2020

Humas, “Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah”. <https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/> diakses pada tanggal 09 November 2020

Wahid, A. B. “Kasus Jual-Beli Jabatan, Plt Bupati Kudus Dipanggil KPK” <https://news.detik.com/berita/d-4703238/kasus-jual-beli-jabatan-plt-bupati-kudus-dipanggil-kpk> diakses pada tanggal 09 November 2020